

## **IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BERARTI) DIKELURAHAN MAUBELI KECAMATAN KOTA KEFAMENANU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**Achaa Manek<sup>1</sup>, Fidelis Atanus<sup>2</sup>, Pionisius Minggu<sup>3</sup>**  
Universitas Timor, Kefamenanu, [achaamanek12@gmail.com](mailto:achaamanek12@gmail.com)<sup>1</sup>  
Universitas Timor, Kefamenanu, [atanusf@gmail.com](mailto:atanusf@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas Timor, Kefamenanu, [s2pionisiusminggu@gmail.com](mailto:s2pionisiusminggu@gmail.com)<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Masalah program bantuan Rumah Tidak Layak Huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. tujuan penelitian adalah “Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BERARTI sudah terlaksana belum optimal diantaranya komunikasi yang dilakukan dengan jelas dan konsisten, sikap para pelaksana mendukung dalam pelaksanaan program, sarana prasarana mendukung, serta pelaksanaan program di laksanakan oleh berbagai sektor (fragmentasi).

**Kata Kunci:** *Program, Implementasi, Program*

### **ABSTRACT**

The problem of the Uninhabitable Housing assistance program needs special attention in order to create a prosperous life. The aim of the research is "To describe the implementation of the Uninhabitable House Remedial Program in Maubeli Village, Kefamenanu City District, North Central Timor Regency. The type of research used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques using interviews, observation, questionnaires and documentation. The results of the research show that the implementation of the BERARTI program has not been optimal, including clear and consistent communication, the attitude of implementers supporting program implementation, supporting infrastructure, and program implementation being carried out by various sectors (fragmentation).

**Keywords:** *Program, Implementation, Program*

## **PENDAHULUAN**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan

*derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak pernah terlepas dari hal-hal

yang berhubungan dengan tempat dimana dia tinggal dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi manusia kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar (*basic need*), di samping kebutuhan akan sandang dan pangan. Tempat tinggal memang sangat penting bagi kehidupan manusia, tanpa tempat tinggal yang layak, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Manusia tidak cukup dengan terpenuhinya kebutuhan akan sandang dan pangan, meskipun kenyataan terdapat peringkat pemenuhan kebutuhan itu dari kebutuhan yang minimum hingga kebutuhan yang tidak terbatas.

Teori Maslow menyebut bahwa sesudah manusia terpenuhi kebutuhan jasmaninya yaitu sandang, papan, dan kesehatan, kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pengembangan kehidupan yang lebih tinggi lagi. Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi kehidupan manusia atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya. Perumahan merupakan pencerminan dan penjelasan secara mendetail tentang diri pribadi manusia baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam kebersamaan di dalam masyarakat. Dengan demikian perumahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, dan merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Jadi jika ditinjau dari proses

bermukiman, rumah merupakan sarana untuk berlindung dari alam, memberi ketentraman hidup dan pusat kegiatan budaya. Di rumah dan lingkunganlah di bentuk kepribadian manusia, maka dari itu diperlukan perumahan yang aman, nyaman, dan tentram. Rumah sederhana yaitu rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lokal meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologis dan iklim setempat serta potensi sosial budaya seperti arsitektur lokal dan cara hidup.

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga. Salah satu wujud kesejahteraan masyarakat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas

kehidupan yang layak bermartabat dan terjangkau antara lain dengan melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan aman. Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH). Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan. Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni (BERARTI) merupakan salah satu program bantuan sosial Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini di mulai pada tahun 2019 yang mana bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 kepada setiap penerimanya. Walaupun bantuan tersebut tidak sepenuhnya bisa membiayai rumah yang akan di perbaiki, namun bantuan tersebut diharapkan menjadi

starter bagi masyarakat untuk menciptakan rumah yang layak huni. Dari data yang diperoleh 2019-2021, jumlah penduduk di Kelurahan Maubeli yang menerima bantuan rumah sebanyak 132 Kepala Keluarga (KK).

#### **METODE PENELITIAN**

Terkait dengan jenis penelitian dalam skripsi ini, jika ditinjau dari rancangan penelitian maka dapat digolongkan ke penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu dengan mengukur Komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*); Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam dalam mengimplementasi kebijakan dengan baik yaitu: staf, informasi, wewenang, fasilitas; Disposisi adalah watak karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau

perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur birokrasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Sumber data primer berasal dari dua informen, yaitu informen kunci (*key informen*) dan informen pendukung. Informen ditunjuk sebagai sumber data yang mampu memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya serta relevan terhadap tujuan peneliti. Sebagai informen terdiri dari: Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Perumahan Rakyat di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bapak Lurah, dan masyarakat. Sumber data sekunder berasal dari buku, internet, dokumen, berita dan lain-lain. Observasi (pengamatan), yaitu melakukan pengamatan/tinjauan dilokasi penelitian di Kelurahan Maubeli tentang pendistribusian rumah tidak layak huni. Teknik pengumpulan data dengan *Interview* (wawancara) yakni dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, sifat wawancara ini adalah wawancara terstruktur dimana daftar pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti; Daftar pertanyaan

(kuesioer) yakni dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab sesuai dengan apa yang dialami atau diketahui; Dokumentasi yakni dengan mengumpulkan data berupa dokumen lainnya; dan observasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Komunikasi**

Untuk mengetahui sejauh mana komunikasi itu dapat berfungsi secara tepat, akurat, dan konsistensi, ada tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi.

#### a) Transmisi

Berdasarkan penelitian di lapangan terkait dengan fokus penelitian komunikasi dengan indikator transmisi yang digunakan untuk mengukur implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni ( BERARTI) di Kelurahan Maubeli yaitu teori Jan Merse ( dalam Hesel Nogi S. Tangkilsan 2002:100) mengidentifikasi faktor- faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu ( informasi, isi kebijakan, dukungan, pembagian potensi). Dari defenisi ini tersebut terlihat adanya dua faktor utama yaitu adanya pencapaian kesesuaian

antara tujuan dan sasaran kebijakan dengan kenyataan dilapangan. Pelaksanaan dalam program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Maubeli yaitu Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni sudah di lakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, sehingga dalam proses pelaksanaan berjalan dengan baik. Dengan adanya pembentukan KMPS (Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola) dapat membantu proses pembangunan bantuan rumah ini. Program BERARTI ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak di pakai agar masyarakat nyaman bertempat tinggal. Selain itu juga dari pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sudah melakukan komunikasi dengan kelurahan.

Kesimpulannya sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jan Merse (dalam Hesel Nogi S. Tangkilsan 2002:100) bahwa faktor- faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu (informasi, isi kebijakan, dukungan, pembagian potensi). Sedangkan dalam implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (BERARTI) di Kelurahan Maubeli belum tepat sasaran karena proses

pembangunan yang berlangsung lama dikarenakan masyarakat kesulitan untuk membiayai ongkos kerja tukang atau menanggung swadaya.

#### b) Kejelasan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait dengan fokus penelitian komunikasi dengan indikator kejelasan, teori yang digunakan implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni ( BERARTI) di Kelurahan Maubeli Sabatier dan Mazmanian (dikutib dalam buku Abdul Wahab:2008) yaitu tujuan yang jelas dan komitmen, sehingga dapat menjadi standar evaluasi dan sumber daya.

Pada penelitian dalam implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Maubeli yaitu dalam sosialisasi itu masyarakat sudah mengerti maksud dan tujuan dari program ini dan mereka juga mengetahui apa yang harus disiapkan dalam persiapan itu berupa: pondasi, tiang, balok, seng, kusen, lantai, dinding pengisi, rangka atap. Dan jika persiapan swadaya dari masyarakat ini berlangsung dengan baik dan lancar maka proses pembangunan ini akan berlangsung sesuai dengan waktu yang di tentukan. Proses pembangunan rumah ini sudah berhasil dilakukan hanya saja ada

yang sampai sekarang ada beberapa rumah yang belum selesai.

Kesimpulannya bahwa teori yang dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian (1979) yaitu tujuan yang jelas dan komitmen, sehingga dapat menjadi standar evaluasi dan sumber daya artinya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertahanan dan Kelurahan Maubeli sudah menyampaikan secara jelas mengenai tujuan dari program BERARTI dan juga sudah disampaikan ke masyarakat secara langsung. Dalam program ini belum tepat sasaran karena ada beberapa rumah yang sampai sekarang belum selesai pembangunan.

c) **Konsistensi**

Hasil penelitian lapangan terkait dengan fokus penelitian komunikasi dengan indikator konsistensi teori yang digunakan implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (BERARTI) di Kelurahan Maubeli teori dari Nurdin Usman (2022:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pada penelitian dalam implementasi program Bedah

Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Maubeli yaitu perintah yang diberikan sudah benar dan jelas serta sudah konsisten sesuai yang diterapkan sehingga tidak membingungkan masyarakat, dan sudah terlaksana dengan baik dan juga dilaksanakan sesuai kebijakan yang ditetapkan. Kesimpulannya bahwa teori yang dikemukakan Nurdin Usman (2022:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan pada instansi terkait Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertahanan dan Kelurahan Maubeli sudah menerapkan seperti dalam teori tersebut seperti penyampaian secara langsung ke masyarakat dan perintah/ kebijakan yang diberikan sudah benar dan jelas.

**2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasi kebijakan dengan baik. Ada beberapa faktor yang terpenuhi sehingga sumber daya berjalan dengan baik.

a) **Staf**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan terkait dengan fokus

penelitian sumber daya dengan indikator staf, teori yang digunakan untuk mengukur implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (BERARTI) di Kelurahan Maubeli harus menerapkan teori Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Pada penelitian dalam implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Maubeli yaitu yang terlibat dalam pelaksanaan program BERARTI ialah Kepala Dinas, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Kelurahan, Kelompok Masyarakat Swakelola (KMPS), Penerima Bantuan Program Berarti, Toko Penyedia Bahan Bangunan, dan Bank Penyalur. Berkaitan dengan sumber kebijakan bahwa adanya dukungan pemerintah melalui pemberian dana Kepada masyarakat melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Swakelola (KMPS) sehingga program ini bisa berjalan sesuai yang di harapkan. Kinerja dari KMPS (Kelompok Penerima Masyarakat Swakelola) itu sendiri sudah berjalan dengan baik dan sudah terlaksana dan pelaksanaan yang mereka kerjakan sudah sesuai petunjuk teknis dari dinas. Kesimpulannya bahwa pelaksanaan program BERARTI sudah berjalan dengan baik dan setiap tugas dan

tanggung jawab masing-masing bekerja sesuai dengan peraturan yang di buat seperti yang ada pada teori yang dikemukakan oleh Mulyadi (2015:12).

b) Informasi

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait dengan fokus penelitian sumber daya dengan indikator informasi teori yang digunakan untuk mengukur implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (BERARTI) di Kelurahan Maubeli harus menerapkan teori Jan Merse (dalam Hesel Nogi S. Tangkilsan 2002:100) mengatakan informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan pemahaman, visi, dan misi dari kebijakan yang dirumuskan. Pada penelitian dalam implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Maubeli penyampain terkait bantuan ini sudah langsung ke masyarakat. Penyampaian itu bukan hanya dikatakan bahwa mereka akan mendapatkan bantuan tetapi mereka juga menjelaskan bahwa bantuan ini juga dari masyarakat yang menanggung swadaya dan apa bila masyarakat setuju dan masyarakat mampu menanggung maka dari pihak kelurahan mengambil data mereka untuk masukkan ke dinas.

Kesimpulannya sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jan Merse

(dalam Hesel Nogi S. Tangkilsan 2002:100) informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan pemahaman, visi, dan misi dari kebijakan yang dirumuskan dalam implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (BERARTI) di Kelurahan Maubeli sudah tepat sasaran karena penyampain untuk masyarakat sudahtepat dan jelas.

c) Wewenang

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait dengan fokus penelitian sumber daya dengan indikator wewenang untuk mengukur implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (BERARTI) di Kelurahan Maubeli harus menerapkan teori Inu Kencana (1999:105) menyatakan bahwa kebijakan (*policy*) dalam pemerintahan hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan penjawatan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.

Pada penelitian dalam implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Maubeli penyampaian terkait dengan wewenang bahwa kewenangan yang di berikan untuk kelurahan tidak sepenuh karena setiap

keputusan yang diambil itu keputusan bersama bukan hanya sepihak. Kesimpulannya bahwa kantor Dinas Perumahan Rakyat dan kelurahan Maubeli sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan teori yang dikemukakan Inu Kencana (1999:105) adalah kebijakan (*policy*) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk pelaksanaan program Bedah Rumah Tidak Layak Huni sudah sesuai dengan aturan yang ada.

### 3. Disposisi

Untuk mengetahui sejauh mana disposisi itu mencapai tujuan secara efektif dan efesien terdapat dapat dua indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan disposisi.

a) Komitmen

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait dengan fokus penelitian disposisi dengan indikator komitmen teori yang digunakan untuk mengukur implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (BERARTI) di Kelurahan Maubeli harus menerapkan teori Mazmanian dan Zabatier (1979) mengatakan bahwa para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomimen yang menggunakan kebijakan mereka, untuk mencapai tujuan kebijakan. Pada penelitian dalam implementasi program

Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Maubeli penyampaian terkait dengan komitmen bahwa komitmen yang di bangun oleh kelurahan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena masyarakat juga mengikuti proses pembangunan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Kesimpulannya bahwa pelaksanaan program BERARTI sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada seperti pada teori yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Zabatier (1979).

b) Kejujuran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait dengan fokus penelitian disposisi dengan indikator kejujuran teori yang digunakan untuk mengukur implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (BERARTI) di Kelurahan Maubeli harus menerapkan teori Nurdin Usman (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pada penelitian dalam implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Maubeli sifat pelaksana terhadap masyarakat, mereka bersikap jujur dan bertanggung

jawab dalam pelaksanaan program Bedah Rumah Rakyat Tidak Layak Huni. Kesimpulannya bahwa para pelaksana program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Maubeli sudah bersikap baik. Seperti yang dikemukakan Nurdin Usman (2002:70).

#### **4. Struktur Birokrasi**

a) *Standart Operating Procedure (SOP)*

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait dengan fokus penelitian struktur birokrasi dengan indikator Standart Operating Procedure (SOP) teori yang digunakan untuk mengukur implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (BERARTI) di Kelurahan Maubeli menggunakan teori Guntur Setiawan (2004:39) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Pada penelitian dalam implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Maubeli bahwa untuk mendapat bantuan masyarakat juga memiliki persyaratan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang sudah di buat. Kesimpulannya sesuai dengan teori yang dikemukakan Guntur Setiawan (2004:39) bahwa pelaksanaan Program

Bedah Rumah Tidak Layak Huni ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan.

b) Fragmentasi

Berdasarkan penelitian di lapangan terkait dengan fokus penelitian struktur birokrasi dengan indikator fragmentasi yang digunakan untuk mengukur implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (BERARTI) di Kelurahan Maubeli yaitu teori Menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Pada penelitian dalam implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Maubeli bahwa dalam proses pembangunan rumah tidak layak huni ini selalu diawasi dari pihak pelaksana terkait, sehingga para pelaksana selalu mengikuti arahan dan mengerjakan sesuai petunjuk teknis. Pada penelitian dalam implementasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Maubeli sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan.

**KESIMPULAN**

Setelah penelitian mengetahui bagaimana implementasi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (BERARTI) di Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kabupaten Timor Tengah Utara, maka

peneliti ini dapat dibuat kesimpulan dalam beberapa hal berdasarkan sub fokus penelitian diantaranya:

1. Komunikasi

Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni sudah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, sehingga dalam proses pelaksanaan berjalan dengan baik. Dengan adanya pembentukan KMPS (Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola) dapat membantu proses pembangunan bantuan rumah. Dalam program ini merupakan program stimulant yang mana menjadi upaya dan prakarsa dari penerima manfaat itu sendiri. Untuk keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari masyarakat itu sendiri dimana apabila mereka belum siap untuk membiayai ongkos kerja maka pembangunan ini akan berlangsung lama.

2. Sumber Daya

Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Maubeli berkaitan dengan sumber kebijakan bahwa adanya dukungan pemerintah melalui pemberian dana kepada masyarakat melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Swakelola (KMPS) sehingga program ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

3. Disposisi

Sikap para pelaksana program bedah rumah tidak layak huni sudah Huni hingga bisa dilaksanakan sesuai dengan

petunjuk teknis hanya saja ada kendala dalam pekerjaan pembangunan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Untuk mendapat bantuan ini masyarakat juga memiliki persyaratan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang sudah di buat. Selain itu juga bahwa dalam proses pembangunan rumah tidak layak huni ini selalu di awasi dari pihak pelaksana terkait sehingga para pelaksana selalu mengikuti arahan dan mengerjakan sesuai petunjuk teknis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formula Ke Implementasi Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Agus, Erwan Puewanto, Dhya Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2002). *Pedoman Pemberantasan Penyakit Saluran Pernafasan Akut*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI
- Handoko Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Meleong. 2003. *Jenis Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kuantitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta
- Setiawan Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R dan D*. Bandung. Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Syahrudin. 2018. *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Nusa Media
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2002.
- Usman, Nurdin. 2002. *Kontek Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo
- Ghafarafalie Bima. 2015. *Implementasi Progam Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tebing*. *Jurnal Sustainable*. FISIP UMRAH. vol 3. hal.2
- Ibrahim, M, 2021. *Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah di*

Dinas Perumahan Permukiman dan  
Pertahanan Kabupaten Pelewali  
Mandar. Mitzal  
*(Demokrasi, Komunikasi dan*  
*Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintah*  
*dan Ilmu Komunikasi*, Mitzal  
Universitas Al Asyariah Mandar. vol  
5.hal.1.

Dewinta, N. (2011). Pelaksanaan  
Program Rehabilitas Sosial-Rumah

Tidak Layak Huni (RSLTH) Bagi  
Keluarga Miskin di Kecamatan  
Bintan Timur, Jurnal *JOM (Jurnal*  
*Online Mahasiswa)*. Universitas  
Riau. Vol.1.hal.2

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun  
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Program Bedah Rumah Tidak Layak  
Huni(BERARTI)